

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, telah memberikan dampak yang luas terhadap berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan pendidikan yang sebelum pandemi dilakukan dengan tatap muka, sekarang dilakukan dengan virtual. Pemberian beberapa layanan kesehatan yang bersifat konsultatif sebagian besar juga dilaksanakan melalui komunikasi telepon atau secara daring. Transaksi langsung dan kegiatan sosial ekonomi yang menimbulkan kerumunan juga banyak dihindari.

Seluruh indikator ekonomi makro dan sosial juga mengalami tekanan yang berat, tidak terkecuali IPM. Pada tahun 2020 IPM Indonesia mencapai 71,94, tumbuh sebesar 0,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan capaian ini, status pembangunan manusia di Indonesia masih berada pada level tinggi (berada pada kisaran antara  $70 \leq \text{IPM} < 80$ ). Pertumbuhan IPM tahun 2020 jauh melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 0,74 persen (Gambar 1.1). Selama periode 2010- 2019, pembangunan manusia di Indonesia setiap tahunnya rata-rata tumbuh sebesar 0,89 persen per tahun. Tetapi dengan pertumbuhan pada tahun 2020 yang melambat tersebut, rata-rata pertumbuhan IPM 2010-2020 menjadi sebesar 0,78 persen per tahun.



Gambar 1.1.  
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, 2010-2020

Perlambatan IPM di masa pandemi COVID ini disebabkan oleh penurunan dimensi standar hidup layak yang diwakili dengan variabel pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan, sementara dimensi umur panjang dan hidup sehat dan pengetahuan yang diwakili dengan variabel Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih meningkat meskipun pertumbuhannya melambat. Perkembangan IPM di Negara-negara asean tahun 1990-2019 khususnya Indonesia, dengan adanya perlambatan IPM di masa pandemi covid-19 Indonesia menduduki peringkat ke 107 di negara-negara Asean, gambar 1.2.

Table 1.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Negara-negara Anggota Asean, 1990-2019

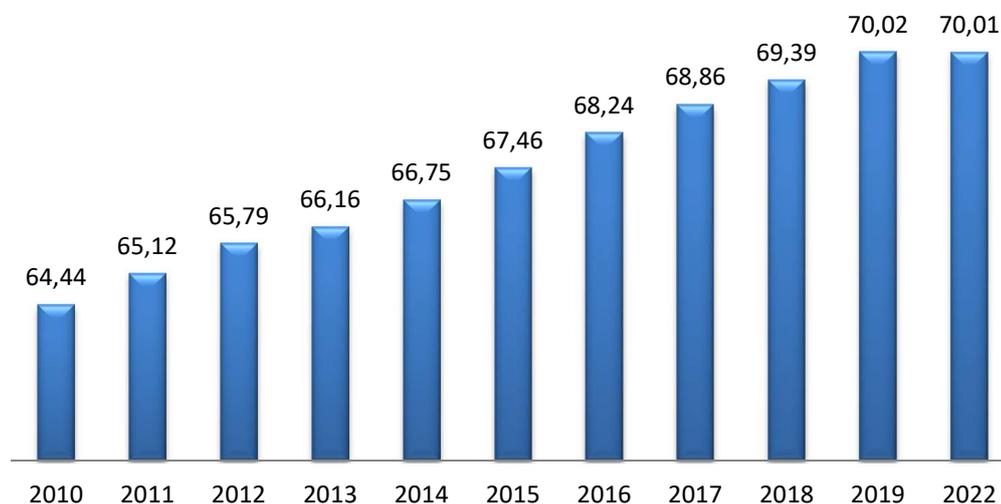
<b>Rank IPM (2019)</b>	<b>Negara</b>	<b>1990</b>	<b>2000</b>	<b>2010</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
11	Singapura	0,721	0,821	0,909	0,926	0,931	0,933	0,936	0,938
47	Brunai D	0,767	0,802	0,827	0,838	0,838	0,838	0,836	0,838
62	Malaysia	0,643	0,723	0,772	0,791	0,796	0,805	0,805	0,810
79	Thailand	0,577	0,652	0,724	0,742	0,749	0,765	0,772	0,777
<b>107</b>	<b>Indonesia</b>	<b>0,523</b>	<b>0,603</b>	<b>0,665</b>	<b>0,690</b>	<b>0,695</b>	<b>0,707</b>	<b>0,712</b>	<b>0,718</b>
107	Filipina	0,593	0,632	0,671	0,696	0,701	0,708	0,711	0,718
117	Vietna	0,483	0,586	0,661	0,683	0,688	0,696	0,700	0,704
137	Laos	0,405	0,471	0,552	0,589	0,598	0,608	0,609	0,613
144	Kamboja	0,368	0,424	0,539	0,565	0,570	0,582	0,585	0,594
147	Myanmar	0,342	0,414	0,515	0,550	0,557	0,572	0,579	0,583

Sumber: BPS SUMSEL

Berdasarkan hasil perhitungan IPM menggunakan metode baru, angka IPM provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 sebesar 70,01 dan secara nasional berada pada peringkat 23, memiliki peringkat yang sama dari tahun sebelumnya, dengan nilai IPM pada tahun 2019 adalah sebesar 70,02. Pada tahun 2020, pembangunan manusia Sumatera Selatan berstatus tinggi.

Pembangunan manusia di Sumatera Selatan memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Perkembangna IPM menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Sumatera Selatan.

Dilihat dari termnya IPM Sumatera Selatan mengalami kenaikan. Dalam sepuluh tahun (2010-2020), terjadi kenaikan 0,83 point.



Gambar 1.2.  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan, 2010-2020

Pertumbuhan IPM merupakan salah satu cara untuk melihat perkembangan manusia di suatu wilayah. Pertumbuhan IPM di Sumatera Selatan cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Pada periode 2019-2020, pembangunan manusia di Sumatera Selatan mengalami kontraksi sebesar 0,01 persen.

Pembangunan daerah merupakan proses pertumbuhan yang terencana dalam upaya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan seluruh komponen dan masyarakat di berbagai sektor. Menurut Arsyad, (2004) ada empat peran yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah yaitu (a) *enterpreneur*, yaitu pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu bisnis, (b) koordinator, yaitu bagaimana pemerintah sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi pembangunan didaerahnya, (c) fasilitator, yaitu pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan perilaku atau budaya masyarakat, (d) stimulator, yaitu pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi

perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga perusahaan yang ada agar tetap berada di daerah tersebut.

Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi yang paling penting adalah keberhasilan pembangunan manusia. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi disegala bidang pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya sekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan (Chalid, 2014).

Pertumbuhan ekonomi adalah hal yang sering dikaitkan dengan pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran dalam pembangunan. Bagi negara berkembang menurut *United Nation Development Program* (UNDP) (Ginting, 2008) menyatakan bahwa hingga pada akhir tahun 1990-an pembangunan manusia ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dalam melihat hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, khususnya di dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan agregat dari pertumbuhan di setiap sektor ekonomi. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan

perekonomian, sebaliknya apabila negatif menunjukkan terjadinya penurunan. Indikator ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan yang telah dicapai oleh suatu daerah. Dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian nasional dan regional, yaitu tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan kabupaten pada tahun-tahun terakhir. Tampak bahwa kondisi berimbas pada pertumbuhan ekonomi/PDRB di berbagai daerah (BPS SUMSEL, 2015).

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui perekonomian suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik secara nasional, provinsi, maupun kabupaten / kota. Menurut Arsyad (2004) PDRB adalah jumlah nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan sektor-sektor tersebut selama satu tahun fiskal. Pertumbuhan ekonomi dicerminkan adanya perubahan PDRB dari satu periode ke periode berikutnya, yang merupakan salah satu petunjuk nyata pembangunan suatu daerah, baik secara langsung maupun secara tidak langsung merupakan keberhasilan implementasi kebijakan suatu daerah. Upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi makro yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan-kegiatan produktif untuk pelaku ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi/ PDRB pada Tabel 1.2. berikut ini:

Tabel 1.2. Persentase Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Kabupaten/Kota Menurut Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. OKU	3,96	4,06	4,88	5,66	-0,01
2	Kab. OKI	4,47	5,11	4,94	5,08	0,24
3	Kab. Muara Enim	6,78	7,16	8,65	7,02	0,03
4	Kab. Lahat	2,34	4,44	4,07	5,62	0,36
5	Kab. Musi Rawas	5,25	5,03	5,79	5,87	0,24
6	Kab. Musi Banyuasin	2,17	3,02	3,21	4,57	-0,04
7	Kab. Banyuasin	5,89	5,05	5,10	5,22	0,13
8	Kab. OKU Selatan	5,19	4,51	5,05	5,04	0,37

9	Kab. OKU Timur	6,17	3,37	4,29	5,47	0,41
10	Kab. Ogan Ilir	5,13	5,14	5,18	5,19	0,14
11	Kab. Empat Lawang	4,54	3,71	4,23	3,62	0,09
12	Kab. Pali	5,19	5,97	6,38	6,16	0,28
13	Kab. Muratara	2,70	4,65	4,21	4,15	0,37
14	Kota. Palembang	5,74	6,21	6,48	5,93	-0,25
15	Kota. Prabumulih	6,62	5,27	5,83	5,55	-0,18
16	Kota. Pagar Alam	4,41	4,81	4,18	3,52	0,01
17	Kota. Lubuk Linggau	6,33	6,31	5,93	5,70	-0,13
	<b>Sumatera Selatan</b>	<b>5,04</b>	<b>5,51</b>	<b>6,01</b>	<b>5,69</b>	<b>-0,11</b>

Sumber: BPS Sumatera Selatan Dalam Angka 2021 (Data diolah).

Berdasarkan Tabel 1.2. menunjukkan bahwa selama tahun 2016-2018 di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan mengalami perkembangan pertumbuhan ekonomi/PDRB yang fluktuatif sedangkan di tahun 2019-2020 mengalami penurunan yang disebabkan oleh pandemi covid-19 . Diantara 17 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Muara Enim dengan persentase PDRB paling tinggi di tahun 2016 yaitu sekitar 6,78 persen. Sedangkan kabupaten/kota yang persentase PDRB nya paling rendah adalah Kabupaten Lahat dengan persentase PDRB sekitar 2,34 persen.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan IPM relatif tidak seirama. Perkembangan PDRB yang tinggi tidak selalu diikuti oleh perkembangan IPM yang tinggi pula. Sebaliknya, pertumbuhan PDRB yang rendah belum tentu diikuti oleh perkembangan IPM yang rendah pula. Sering kali tingginya pendapatan domestik yang tinggi tidak diimbangi dengan pembangunan manusia yang sejalan, sehingga dapat menimbulkan adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan tidak dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun adanya IPM tidak berarti mengesampingkan peran PDRB sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah, namun merupakan sebuah tantangan bagi suatu negara untuk menerjemahkan pembangunan manusia di dalamnya (Baeti, 2013). Berdasarkan penelitian sebelumnya menurut Mirza, 2012 menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM yang berarti pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi maka akan meningkatkan IPM.

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara. Suatu negara dikatakan maju bukan saja dihitung dari pendapatan domestik bruto saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan paradigma pembangunan yang berkembang pada tahun 90-an yaitu paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (*human centered development*). Secara konsep, pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak, yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. Pada tataran praktis peningkatan kapasitas dasar adalah upaya meningkatkan produktivitas penduduk melalui peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan.

Perkembangan penduduk miskin di provinsi Sumatera Selatan dari tahun ke tahun berfluktuatif sehingga diperlukan beberapa program guna meminimalisasi tingkat fluktuasinya dan dengan demikian pembangunan manusia dapat lebih stabil. Kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang sebenarnya bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan pun terabaikan. Hal tersebut menjadikan *gap* pembangunan manusia di antara keduanya pun menjadi besar dan pada akhirnya target capaian IPM yang ditentukan oleh pemerintah menjadi tidak terealisasi dengan baik. Adapun perkembangan kemiskinan di provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari Tabel 1.3. berikut.

Tabel 1.3. Persentase Kemiskinan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. OKU	13,29	12,95	12,61	12,77	12,75
2	Kab. OKI	16,03	15,75	15,28	15,01	14,73
3	Kab. Muara Enim	13,56	13,19	12,56	12,41	12,32
4	Kab. Lahat	17,11	16,81	16,15	15,92	15,95
5	Kab. Musi Rawas	14,30	14,24	13,76	13,37	13,50
6	Kab. Musi Banyuasin	17,27	16,75	16,52	16,41	16,13
7	Kab. Banyuasin	11,72	11,47	11,32	11,33	11,17

8	Kab. OKU Selatan	10,95	10,98	10,64	10,53	10,85
9	Kab. OKU Timur	11,29	11,00	10,57	10,43	10,43
10	Kab. Ogan Ilir	13,80	13,58	13,19	13,31	13,36
11	Kab. Empat Lawang	12,54	12,44	12,25	12,30	12,63
12	Kab. Pali	14,26	14,53	13,81	13,47	12,62
13	Kab. Muratara	20,00	19,49	19,12	19,12	19,47
14	Kota. Palembang	12,04	11,4	10,95	10,90	10,89
15	Kota. Prabumulih	11,44	11,42	11,39	11,61	11,59
16	Kota. Pagar Alam	9,19	8,89	8,77	8,90	9,07
17	Kota. Lubuk Linggau	13,99	13,12	13,02	12,95	12,71
	<b>Sumatera Selatan</b>	<b>13,54</b>	<b>13,19</b>	<b>12,80</b>	<b>12,71</b>	<b>12,66</b>

Sumber: BPS Sumatera Selatan Dalam Angka 2021 (Data diolah).

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara didunia khususnya di provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Tabel 1.3 menunjukkan bahwa perkembangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2016-2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif terkadang mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 rata-rata jumlah angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 12,98 persen.

Kemiskinan akan menyebabkan tingkat kemakmuran masyarakat tidak maksimal sedangkan tujuan akhir dari pembangunan yaitu untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Jika angka kemiskinan di suatu daerah tinggi maka akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Pendapatan masyarakat berkurang sehingga daya beli masyarakat menurun, pendidikan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia juga tidak dapat tercukupi. Mereka juga tidak dapat menikmati kehidupan yang layak pula, sehingga kesejahteraan mereka tidak terpenuhi. Berdasarkan penelitian sebelumnya menurut Chalid dan Yusuf, 2014 menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap IPM. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap IPM.

Tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan rakyat. Manusia bukan hanya merupakan obyek pembangunan tetapi diharapkan dapat menjadi subyek, sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan suatu wilayah yang secara makro menjadi kemajuan suatu negara demikian juga di

Provinsi Sumatera Selatan. Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia tiap-tiap negara/wilayah. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (daya beli). Indeks pembangunan manusia di Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4. Persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. OKU	67,47	68,28	69,01	69,45	69,32
2	Kab. OKI	65,44	66,11	66,57	66,96	66,82
3	Kab. Muara Enim	66,71	67,63	68,28	68,88	68,74
4	Kab. Lahat	65,75	66,38	66,99	67,62	67,44
5	Kab. Musi Rawas	64,75	65,31	66,18	66,92	66,79
6	Kab. Musi Banyuasin	66,45	66,96	67,57	67,83	67,69
7	Kab. Banyuasin	65,01	65,85	66,40	66,90	66,74
8	Kab. OKU Selatan	63,42	63,86	64,84	65,43	65,30
9	Kab. OKU Timur	67,38	67,84	68,58	69,34	69,28
10	Kab. Ogan Ilir	65,45	65,63	66,43	67,22	67,06
11	Kab. Empat Lawang	64,00	64,21	64,81	65,10	65,25
12	Kab. Pali	61,66	62,58	63,49	64,33	64,70
13	Kab. Muratara	63,05	63,18	63,75	64,32	64,49
14	Kota. Palembang	76,29	77,22	77,89	78,44	78,33
15	Kota. Prabumulih	73,19	73,58	74,04	74,40	74,55
16	Kota. Pagar Alam	65,37	66,81	67,62	68,44	68,31
17	Kota. Lubuk Linggau	73,17	73,67	74,09	74,81	74,78
	<b>Sumatera Selatan</b>	<b>67,46</b>	<b>68,86</b>	<b>69,39</b>	<b>70,02</b>	<b>70,01</b>

Sumber: BPS Sumatera Selatan Dalam Angka 2021 (Data diolah).

Berdasarkan Tabel 1.4 menunjukkan bahwa selama tahun 2016-2020 di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan memiliki perkembangan yang positif, yang ditunjukkan dengan meningkatnya IPM masing-masing kabupaten/kota selama tahun 2016-2020 seiring dengan meningkatnya IPM Provinsi Sumatera Selatan. Perbedaan sumber daya (alam, manusia, teknologi, uang/modal) yang dimiliki/dikuasai oleh masing-masing daerah menyebabkan terjadinya ketimpangan atau perbedaan kualitas pembangunan SDM antar wilayah,

sebagaimana ditunjukkan melalui besaran angka IPM. Diantara 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau dan Kota Prabumulih adalah kabupaten/kota yang peringkat IPM nya tertinggi pada tahun 2020. IPM Kota Palembang pada tahun 2020 adalah 78,33 persen, Kota Lubuk Linggau 74,78 persen dan Kota Prabumulih 74,55 persen. Sedangkan nilai IPM terendah dimiliki oleh kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 64,49 persen pada tahun 2020.

Hal ini menjadi sebuah target guna menjadi Provinsi Sumatera Selatan yang mampu bersaing dengan daerah atau provinsi lain khususnya di Indonesia sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dalam hal kualitas sumber daya manusia. IPM merupakan salah satu indikator dalam mencapai pembangunan ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan meminimalisasi dari kemiskinan. Pemerintah daerah menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif mempunyai kemiskinan yang terus naik dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai proritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan sasaran pembanguna nasional yang telah ditetapkan melauai pembanguna jangka panjang dan pendek. Pembangunan manusia atau peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam strategi kebijakan pembangunan nasional. Penekanan terhadap pentingnya peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan menjadi suatu kebutuhan karena kualitas manusia di suatu wilayah memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan wilayahnya.

Strategi pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan merupakan upaya meningkatkan kesediaan akses bagi setiap individu guna memenuhi setiap kebutuhan hidupnya. Akses yang dimaksud adalah, jangkauan yang dapat diperoleh oleh setiap individu guna melanjutkan kehidupan yang berkualitas. Masalah keterbatasan akses yang seringkali menjadi masalah mayoritas insan, adalah keterbatasan dalam pemenuhan akses dari sisi fisik dan non-fisik. Akses

fisik berupa pemenuhan konsumsi setiap barang/benda, sedangkan akses nonfisik berupa jangkauan setiap individu terhadap telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Berdasarkan permasalahan ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun kegunaan dalam penelitian ini:

1. Bagi peneliti, untuk mengetahui pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan serta sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Ekonomi Pertanian
2. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi arah kebijakan pemerintah daerah agar dapat

menetapkan kebijakan pembangunan yang tepat, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia serta dapat menurunkan kemiskinan dan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah di Sumatera Selatan terutama yang berkaitan dengan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan di masa mendatang.